

MOTIF INVASI MILITER RUSIA TERHADAP UKRAINA TAHUN 2022

Muhammad Fauzan Rizki Ramadhan
Universitas Bakrie Jakarta
ojarizki8@gmail.com

Abstract

This research analyses the motives behind Russia's military invasion of Ukraine's sovereign territory in 2022. The invasion is a continuation of Russia's invasion of Crimea in 2014, and is part of a long history of conflict in the Eastern European region. This qualitative research focuses on Russia's perspective and how the country sees the main reasons for the conflict, namely the formation of 'the near abroad' policy and its link to the expansion of the US-led NATO (North Atlantic Treaty Organization) alliance. Using the theory of structural realism, this study tries to provide preliminary assumptions of motives with the conditions of international structures and their impact on Russia. This assumption is then strengthened by the elaboration of opinions from related research subjects, which can confirm these assumptions.

Keywords: International Politics, Conflict, Geopolitics, Neorealism, Eastern Europe

Abstrak

Penelitian ini menganalisis motif dibalik invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap wilayah kedaulatan Ukraina pada tahun 2022. Invasi tersebut merupakan kelanjutan dari invasi Rusia atas wilayah Krimea pada tahun 2014, dan merupakan bagian dari sejarah panjang dari konflik di wilayah Eropa Timur. Penelitian kualitatif ini berfokus pada perspektif Rusia dan bagaimana negara tersebut melihat alasan utama munculnya konflik, yaitu formasi kebijakan 'the near abroad' dan kaitannya dengan ekspansi aliansi NATO (North Atlantic Treaty Organization) pimpinan Amerika Serikat. Dengan menggunakan teori realisme struktural, penelitian ini mencoba memberikan asumsi awal dari motif dengan kondisi struktur internasional dan dampaknya terhadap Rusia. Asumsi tersebut kemudian diperkuat dengan penjabaran opini dari subjek-subjek penelitian terkait, yang dapat memberikan konfirmasi akan asumsi tersebut.

Kata Kunci: Politik Internasional, Konflik, Geopolitik, Neorealisme, Eropa Timur.

*Article History: Received 22 April 2023, Revised: 15 May 2023,
Accepted: 01 June 2023, Available online 30 June 2023*

Pendahuluan

Pasca Perang Dingin, studi mengenai politik internasional mulai mengenyampingkan signifikansi dari pembahasan mengenai konflik militer. Kajian keamanan yang merupakan payung pembahasan dari kajian mengenai konflik, lebih berfokus pada kajian non-tradisional seperti terorisme, perubahan iklim, dan ketimpangan ekonomi. Alterasi tersebut bertujuan untuk memberikan kajian keamanan kapabilitas untuk beradaptasi sehingga menciptakan sebuah studi yang lebih holistik. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini konflik militer masih ikut mewarnai dinamika dari politik internasional. Peristiwa-peristiwa seperti Konflik Rusia-Georgia pada tahun 2008, Perang Sipil Suriah pada tahun 2011, dan Aneksasi Krimea pada tahun 2014, kembali mengangkat signifikansi konflik militer dalam diskursus terkait studi politik internasional. Uniknya, mayoritas dari konflik-konflik di atas melibatkan negara-negara 'adidaya' yang menjadi pemain utama di dalam struktur internasional, salah satunya adalah Federasi Rusia.

Pada dasarnya, konflik militer antara Rusia dan Ukraina merupakan sesuatu yang sudah diprediksi oleh peneliti politik internasional pada level akademis. Sejumlah peneliti seperti Karagiannis (2013), Charap & Darden (2014), Karyakin (2015) dan Kuzio (2016) berpendapat bahwa potensi konflik tersebut dapat terlihat dari faktor-faktor seperti perkembangan geopolitik internasional dan kebijakan luar negeri Rusia. Karagiannis (2013) dan Karyakin (2015) berpendapat bahwa era Presiden Putin, ditandai dengan berkembangnya kebijakan luar negeri Rusia ke arah yang lebih agresif dan asertif. Karagiannis (2013) melanjutkan bahwa hal di atas bersumber dari susunan kebijakan luar negeri Rusia yang mempromosikan nilai-nilai nasionalisme dan ekspansionisme. Hal tersebut terbukti jika melihat dari sejumlah konflik yang muncul di wilayah Eropa Timur pada abad ke-21. Sementara Charap & Darden (2014) dan Kuzio (2016) memilih berfokus pada ekspansi pengaruh Amerika

Serikat, yang didasari oleh konstruksi sistem internasional berdasarkan liberalisme internasional. Runtuhnya Uni Soviet pada akhir Perang Dingin, telah merubah kondisi dunia menuju unipolar dengan Amerika Serikat menempati posisi teratas dalam struktur internasional (Kuzio, 2016). Sehingga Amerika Serikat dapat dengan leluasa menanamkan pengaruh sosio-ekonominya ke berbagai belahan dunia, termasuk pada Ukraina yang merupakan bagian dari kepentingan nasional Rusia.

Faktor-Faktor yang dilampirkan di atas, menjadikan konflik ini penting dan menarik untuk diteliti. Invasi militer yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina, merupakan bagian penting dari sejarah konflik Eropa Timur dan berpotensi mengancam kestabilan perpolitikan Eropa dan juga kondisi geopolitik dunia. Pada aspek akademis, konflik ini juga kembali menyematkan signifikansi dari kajian keamanan bertajuk militer, khususnya pada wilayah Eropa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban akan motivasi dari konflik dalam perspektif Rusia dengan cara mengaitkannya dengan relasi kausalitas antara struktur internasional dan dampak yang diberikannya terhadap perilaku negara.

Penelitian ini menggunakan teori realisme struktural/neorealisme. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Walz (1988: 617), James (1995: 184), Glaser (2003: 410) dan Mearsheimer (2007: 86), realisme struktural merupakan teori yang melihat signifikansi struktur internasional terhadap pola interaksi antar negara. Teori ini merupakan pembaharuan dari teori realisme klasik yang memandang bahwa sistem internasional didasari oleh hukum objektif yang bersumber dari sifat negatif manusia (seperti keserakahan dan skeptisisme),¹ (Morgenthau, 1947: 17; Elman, 2007: 17). Berkembang dari argumentasi di atas, Mearsheimer (2007: 72) berpendapat bahwa kompetisi kekuasaan antar negara didorong oleh hal

¹Morgenthau (1947:18) beranggapan bahwa seperti layaknya manusia, negara merupakan entitas organik yang akan berkonflik antar satu sama lain, demi merebut atau menjaga hal yang dianggap sebagai kepentingannya (*animus dominandi*).

yang lebih krusial dibandingkan dengan sifat alamiah manusia. Menurutnya, struktur internasional yang anarkis dan penuh dengan ketidakpastian merupakan kontributor utama terjadinya konflik aktor-aktor internasional (Mearsheimer, 2007: 72). Seperti halnya Mearsheimer (2007: 72), Jones (2009: 230) dan Amao (2019: 95) memperhatikan bahwa teori realisme struktural memiliki titik pandang yang berasal dari aktor negara sebagai sebuah unit primer. Negara sebagai aktor utama dalam politik internasional, berfokus pada isu mengenai kapabilitas dan kepentingan serta mengabaikan segala pembicaraan mengenai norma dan komitmen (Jones, 2009: 230; Amao, 2019: 95). Kepentingan tersebut dipengaruhi oleh idiosinkrasi dari masing-masing negara yang bersumber dari atribut dan sejarah, kondisi politik domestik, serta kondisi geopolitik internasional (Jones, 2009: 230). Dengan kata lain, teori realisme struktural mengemukakan ide bahwa negara akan dengan mudah menanggalkan prinsip moralitas universal, demi mempertahankan eksistensinya di dalam struktur internasional berbasis anarki.

Gagasan mengenai eksistensi, memaksa negara untuk mengakumulasi kekuatan sebagai penjamin utama keselamatannya² (Glaser, 2003: 410; Mearsheimer 2009: 242). James (1995: 184), Mearsheimer (2009: 241) dan Amao (2019: 96) melanjutkan bahwa ‘perlombaan atau perseteruan kekuatan’ akan menyebabkan terjadinya perubahan pada posisi struktural negara, dan terlebih lagi pada polaritas dari politik internasional. Perubahan tersebut terjadi akibat eksistensi dari satu atau dua negara adidaya yang mendominasi lanskap politik internasional, serta membelah dunia sesuai dengan kepentingannya (Amao, 2019: 95). Menurut Mearsheimer (2007: 85), besarnya perolehan kekuatan yang dimiliki oleh negara adidaya tersebut, meminimalisir potensi gangguan dari negara

²Snyder (2003: 155) menjelaskan bahwa akumulasi kekuatan yang terjadi pada politik internasional akan menyebabkan timbulnya ‘dilema keamanan’, dimana negara terjebak di dalam kondisi kecurigaan permanen yang ditandai oleh upaya negara untuk menyeimbangkan perolehan kekuatan negara lain.

lain, dan dengan demikian menjamin keberlangsungan hidupnya di dalam struktur internasional.

Jika dikorelasikan dengan topik utama penelitian, realisme struktural memberikan opsi instrumen pengkajian terkait kepentingan nasional dengan motivasi dari terjadinya sebuah konflik. Dalam penelitian ini, diskursus mengenai motivasi dari penyerangan Rusia terhadap Ukraina disandari oleh beberapa asumsi yang dapat ditelusuri pada penjelasan realisme struktural yaitu: (1) Pertama, anarkisnya struktur internasional bertanggung jawab memicu terjadinya konflik antar negara, (2) Kemudian, sejarah serta kondisi politik domestik dan internasional memainkan peran penting dalam mendefinisikan apa yang disebut oleh negara sebagai 'kepentingan nasional', (3) Terakhir, guna menjamin keselamatannya dalam struktur internasional, negara akan berlomba-lomba untuk memperoleh ataupun mempertahankan aset yang dipersepsikan sebagai 'kekuatan', untuk meminimalisir gangguan dari negara lain atau mendapatkan status sebagai negara adidaya. Asumsi-asumsi tersebut akan peneliti jadikan sebagai sandaran untuk pembahasan selanjutnya terkait konstruksi kebijakan luar negeri Rusia sebagai sebuah negara dalam sistem internasional.

Sejarah Geopolitik Rusia dan Konstruksi Kebijakan “*The Near Abroad*”

Sejarah Rusia sebagai sebuah negara modern, dimulai dari pembentukan Kekaisaran Rusia yang merupakan prekursor dari negara Rusia modern saat ini. Ledonne (2004: 4) dan Plokhly (2008: 40) berargumen bahwa terdapat keterikatan yang kuat antara sejarah Rusia yang ekspansionistik, dengan identitas kenegaraan yang terbentuk dari kenyataan geografis dan pengaruh struktur internasional. Kebijakan ekspansionis Rusia didorong oleh posisi strategisnya, yakni Rusia bertindak sebagai 'jembatan' antar dua benua besar dunia, yaitu Eropa dan Asia (Ledonne, 2004: 4; Smith, 2016: 1). Kondisi tersebut memunculkan sebuah gambaran bahwa Rusia merupakan sebuah peradaban unik dan mandiri, yang tidak bisa secara

serta merta diasosiasikan kepada kultur timur ataupun Barat (Schmidt, 2005: 88; Dugin, 2014: 11). Plokhy (2004: 42) dan Dugin (2014: 11) berpendapat bahwa narasi 'eksepsionalisme' di atas merupakan cara paling efektif bagi Rusia menjaga posisi dan keselamatan dari ruang lingkup serta kepentingan nasionalnya. Dengan demikian, Kekaisaran Rusia pada masa kejayaannya menjadi sebuah imperium raksasa yang membentang dari kota Warsawa di Eropa Tengah, sampai dengan Vladivostok di Asia Timur (Plokhy, 2008: 39-40). Tradisi ekspansionis tersebut, telah menyematkan sikap imperialistik yang kemudian menjadi karakteristik inheren dari peradaban bangsa Rusia yang nampak sampai dengan saat ini (Plokhy, 2006: 42).

Sebagai pilar identitasnya, Kekaisaran Rusia menempatkan pengejaran kekuatan sebagai misi sakral untuk memanipulasi dan mendominasi ruang geopolitik negara lain. Hal tersebut dilakukan demi memproyeksikan dirinya sebagai sebuah negara yang berada pada puncak struktur internasional (Neumann, 2008: 128; 2015: 8). Weeks (2006: 29) dan Bushkovitch (2012: 129) menyoroti bagaimana sepanjang eksistensinya dalam sistem internasional, konsep mengenai 'ruang lingkup' (*sphere of influence*) mendominasi pembahasan kebijakan luar negeri Rusia. Ekspansi Kekaisaran Rusia terhadap berbagai wilayah di Eropa dan Asia mendirikan sebuah ruang geopolitik yang menjadi ekstensi dari kepentingan nasional Rusia dalam ranah internasional (Weeks, 2006: 29; Bushkovitch, 2012: 129). Narasi yang sama juga berlanjut pada era Uni Soviet, dimana negara sosialis tersebut memiliki jaringan aliansi 'negara satelit',³ di Eropa Timur dan Asia guna menciptakan sebuah ruang lingkup yang menjadi ekstensi dari

³Menurut Yakobson (1949: 185), konsep 'negara satelit' merupakan istilah dalam kamus kebijakan luar negeri Uni Soviet, yang digunakan untuk mendeskripsikan negara-negara yang kapabilitas kedaulatannya bergantung kepada Uni Soviet, dan merupakan ekstensi dari kekuasaannya dalam ruang geopolitik. Negara-negara satelit Uni Soviet pada masa Perang Dingin meliputi Polandia, Cekoslovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, dan Jerman Timur (Yakobson, 1949: 185).

kekuasaan politiknya (Duignan, 2000: 10-11; Sperling & Webber, 2009: 492). Eksistensi dari ruang lingkup tersebut menjadi alasan utama terjadinya Perang Dingin yang berakhir pada disintegrasi Uni Soviet pada tahun 1991 (Hamianin, Wawancara, 18 Oktober, 2022). Pembahasan mengenai ruang lingkup, merupakan pembahasan yang vital untuk mengetahui apa yang Rusia lihat sebagai ruang geopolitik dan kepentingan nasionalnya.

Menariknya, identitas tersebut merupakan sumber animositas yang terjadi antara Rusia dengan dunia internasional (terkhusus dunia Barat) (Sprozluk, 2009: 4; Kappeler, 2014: 109). Sebagai sebuah peradaban dengan sentimen nasionalisme yang tinggi, rivalitas antara Rusia dengan dunia Barat merupakan hal yang tak terelakan (Kappeler, 2014: 109-110). Bangsa Rusia mengimajinasikan diri mereka terlibat di dalam sebuah pertarungan peradaban, dimana mereka secara konstan dihantui oleh ancaman terhadap identitas serta kedaulatan mereka (Duncan, 2005: 283). Perspektif tersebut kembali menegaskan Rusia sebagai arketipe dari sebuah negara realis yang mencoba memperluas kekuatan/pengaruh pada lingkungan internasional. Hal tersebut menyebabkan Rusia berupaya untuk menggunakan kekuatannya untuk berlomba menuju posisi teratas dalam struktur internasional demi bertahan hidup. Identitas tersebut lantas menjadi pilar utama dan mendominasi nilai filosofis dari para pembuat kebijakan Rusia pasca komunisme.

Dengan demikian, kebijakan luar negeri Rusia sangatlah dipengaruhi oleh perspektif politik dari rezim yang sedang berkuasa. Relasi diplomatik antara Rusia dengan aktor internasional lain, merupakan produk dari interaksi unit politik yang berada di dalam badan pembuat kebijakannya. Pernyataan di atas tentunya sejalan dengan asumsi realisme struktural terkait dengan korelasi antara kebijakan luar negeri dengan kondisi politik domestik suatu negara. Marantz (1997: 345), Grossman (2005: 335), dan Lynch (2016: 3), memperhatikan

bahwa pasca kejatuhan Uni Soviet, Federasi Rusia tidak mengambil arah geopolitik menuju kooperasi dan integrasi dengan Eropa seperti halnya Ukraina. Marantz (1997: 345) melihat bahwa pada pertengahan tahun 1993, Rusia secara perlahan meninggalkan gestur rekonsiliasi dengan dunia Barat dan semakin asertif serta nasionalistik mengenai kebijakan luar negerinya. Lynch (2016: 10) berpendapat bahwa hal tersebut dikarenakan kondisi politik internal Rusia yang masih memperdebatkan mengenai basis fundamental dari kebijakan luar negeri Rusia, atau yang Presiden Yeltsin sebut sebagai “*Russkaya Ideya*” (Ide filosofis bangsa Rusia), argumen yang juga mendapat dukungan dari Marantz (1997: 350) dan Toal (2017: 71). Toal (2017: 71-72) kemudian menginterpretasikan bahwa diskursus antara akademisi dan pembuat kebijakan mengenai arah kebijakan luar negeri Rusia, umumnya terbagi menjadi tiga kelompok kepentingan yaitu: liberalis, imperialis dan *derzhava*.

Kubu liberalis meyakini bahwa Rusia sebagai sebuah negara dalam struktur internasional, harus mengikuti asas liberalisme dan prinsip-prinsip yang dilandasi oleh kesepakatan bersama dengan aktor internasional lainnya (Toal, 2017: 74). Kubu liberalis mempunyai pandangan bahwa lanskap geopolitik Eropa Timur pasca kejatuhan Uni Soviet, merupakan lanskap yang harus dipimpin oleh paham liberalisme dan didasarkan pada konsensus bersama sesuai dengan hukum internasional yang relevan (Toal, 2017: 75). Tentunya dalam relasinya dengan dunia internasional, kubu liberalis menginginkan Rusia untuk mengadopsi model politik-ekonomi layaknya dunia Barat. Kubu liberalis meyakini bahwa ambiguitas yang terjadi pasca kejatuhan Uni Soviet, merupakan momen yang tepat untuk mereparasi relasi antara Rusia dengan dunia Barat (Laitin, 2000: 134-135; Chebankova, 2014: 360). Menurut kubu liberalis, Rusia harus mengadopsi kembali format-format westernisasi guna mereformasi identitas Rusia yang selama ini dikenal sebagai sebuah negara yang imperialistik (Chebankova, 2014: 359; Toal, 2017:75). Tujuannya adalah mengintegrasikan Rusia kepada sistem ekonomi politik dunia Barat dan menutup

permusuhan yang diwariskan oleh identitas historis Rusia sebagai sebuah negara adidaya (Laitin, 2000: 136). Hal tersebut dianggap esensial, demi mewujudkan sebuah Rusia baru dengan sistem demokrasi yang berfungsi serta perekonomian yang makmur (Chebankova, 2014: 360).

Kubu imperialis dan *derzhava* pada dasarnya memiliki kemiripan retorika antar satu sama lain. Perbedaan diantara keduanya, terletak pada intensitas dari kecurigaan yang mereka miliki terhadap demokrasi-liberal dan dunia Barat. Kubu imperialis meyakini bahwa kebijakan luar negeri berprinsip liberalisme dan kooperasi, akan mereduksi status Rusia sebagai negara adidaya (Schmidt, 2005: 87; Dugin, 2014: 11). Kubu imperialis berkiblat pada konsep Eurasianisme⁴ yang didasari oleh pengalaman historis dan kesadaran nasional, bahwa Rusia merupakan peradaban mandiri serta ditakdirkan untuk menjadi imperium yang berkuasa atas wilayah Eropa dan Asia (Schmidt, 2005: 88; Dugin, 2014: 11; Toal, 2017: 77). Mereka membayangkan sebuah fantasi untuk menghidupkan kembali Kekaisaran Rusia, dan berargumen bahwa Rusia harus berekspansi secara fisik ke wilayah yang dianggap sebagai bagian dari kepentingan nasionalnya (Schmidt, 2005: 90; Toal, 2017: 78). Bagi kubu imperialis, orientasi kebijakan luar negeri Rusia harus didasari pada keyakinan bahwa Rusia merupakan negara yang memiliki takdir sebagai hegemon dunia (Schmidt, 2005: 90; Laurelle, 2008: 6; Toal, 2017: 77). Sehingga Rusia tidak memiliki jalan lain selain berkonfrontasi dengan dunia Barat agar terjaminnya keselamatan institusi, identitas serta tradisi historis Rusia sebagai sebuah negara adidaya (Toal, 2017: 78).

Sementara itu, kubu *derzhava* cenderung memiliki pandangan yang realistis terhadap kebijakan luar negeri Rusia.

⁴Eurasianisme merupakan sebuah perspektif intelektual politik internasional, yang memandang bahwa Rusia telah ditempatkan secara alamiah pada posisi yang unik, yaitu tepat pada 'jantung' dunia diantara benua Eropa dan Asia (Shlapentokh, 1997: 130; Laurelle, 2008: 7). Perspektif tersebut menetapkan bahwa Rusia bukanlah merupakan sebuah *nation-state*, melainkan sebuah peradaban yang ditakdirkan untuk menguasai kedua benua tersebut sebagai sebuah hegemon (Shlapentokh, 1997: 130; Laurelle, 2008: 8).

Kubu *derzhava* meyakini bahwa Rusia saat ini tidak bisa mewujudkan visi yang Eurasianisme yang digadang oleh kubu imperialis (Kolesnikov, 1996: 359). Oleh karena itu, kubu tersebut berpendapat bahwa jalan logis yang harus ditempuh saat ini adalah untuk merekonstruksi ulang identitas Rusia sebagai kekuatan besar di Eropa Timur (Toal, 2017: 82). Penentangan langsung terhadap hegemoni dari Amerika Serikat akan berakibat fatal bagi keberlangsungan Rusia modern, sementara penggunaan liberalisme sebagai prinsip interaksi internasional, akan menjatuhkan harga diri Rusia sebagai kekuatan historis dan membuat identitas unik Rusia rentan terhadap pengaruh dari Amerika Serikat (Toal, 2017: 83). Pada esensinya, visi pragmatis kubu *derzhava* bertujuan untuk mempertahankan keselamatan Rusia, tidak hanya atas kultur dan tradisi historisnya, melainkan juga atas identitasnya sebagai sebuah peradaban mandiri (Cottrell, 1996: 167; Toal, 2017: 83; Trenin, 2020). Bagi kelompok *derzhava*, pandangan tersebut sangatlah ideal dan relevan dengan kondisi kontemporer Rusia, dibandingkan dengan pengimplementasian ideologi mewah dan idealis yang seringkali terlihat hipokritikal (Toal, 2017: 86). Menjelang mundurnya Presiden Yeltsin pada akhir tahun 1999, perspektif kubu *derzhava* telah mendominasi proses penyusunan kebijakan luar negeri Rusia, dan menjadi suara universal yang memandu Rusia terkait dengan interaksinya dengan komunitas internasional (Toal, 2017: 86). Dilapisi oleh pola pemikiran kelompok *derzhava*, Rusia berupaya untuk membangun kembali kekuasaan geopolitiknya melalui metode yang cenderung pragmatis (Toal, 2017: 86). Rusia menyadari bahwa kapabilitas ekonomi dan militernya, tidak dapat secara langsung menentang kondisi unipolaritas yang telah diciptakan oleh Amerika Serikat (Cameron & Ornstein, 2012: 2). Oleh karena itu, Rusia memilih untuk berfokus pada objek spesifik yang dianggap memiliki signifikansi tinggi terhadap kepentingan luar negerinya (Lepingwell, 1994: 72). Manifestasi dari pandangan tersebut adalah sebuah doktrin luar

negeri yang disebut sebagai *'blizhneye zarubezhnye'* atau *'the near abroad'* (Lepingwell, 1994: 73; Tolstrup, 2009: 923).

Menurut Lepingwell (1994: 70), Cameron & Ornstein (2012: 3) dan Rotaru (2017: 1), *'the near abroad'* merupakan sebuah doktrin luar negeri yang menetapkan adanya sebuah lingkup pengaruh terhadap objek yang dianggap sebagai kepentingan nasional Rusia. Objek penting tersebut merupakan 14 negara yang sebelumnya tergabung ke dalam federasi Uni Soviet, yang meliputi Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Estonia, Latvia, Lithuania, Moldova, Belarus dan tentunya Ukraina (Lepingwell, 1994: 73; Rotaru, 2017: 2). Sepertinya halnya *'monroe doctrine'*⁵ yang dimiliki Amerika Serikat, doktrin luar negeri *'the near abroad'* merupakan sebuah bentuk afirmasi bahwa keamanan kepentingan nasional dan internasional Rusia, bergantung pada kestabilan dari negara-negara yang dianggap sebagai bagian dari doktrin tersebut (Tolstrup, 2009: 924). Segala turbulensi politik yang dialami oleh negara-negara tersebut dapat dengan seketika berubah menjadi permasalahan serius yang mengancam keselamatan Rusia (Litera, 1994: 45; Lepingwell, 1994: 70). Merujuk dari penjelasan Abushov (2009: 188), Way (2015: 692), dan Toal (2017: 89) doktrin *'the near abroad'* merupakan bukti konkrit dari upaya Rusia untuk mempertahankan akumulasi kekuatan geostrategisnya melalui jalur imperialisme. Tolz (2002: 244) menambahkan, doktrin tersebut secara vulgar mengasersikan pandangan bahwa kemerdekaan dari negara-negara *'the near abroad'* merupakan sesuatu yang abnormal dan bersifat sementara. Signifikansi dari doktrin tersebut meningkat ketika Rusia mencoba untuk mempertahankan ruang lingkungannya dari apa yang dianggapnya sebagai ancaman eksistensial yang bersumber dari NATO.

⁵Merujuk dari penjelasan Gilderhus (2006: 6), *"monroe doctrine"* merupakan sebuah doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang memberikannya legitimasi untuk melakukan intervensi politik pada negara-negara di benua Amerika. Doktrin tersebut secara efektif menjadikan benua Amerika sebagai ruang lingkup geopolitik Amerika Serikat (Gilderhus, 2006: 6).

NATO Sebagai Ancaman Terhadap Rusia

Secara garis besar, NATO (*North Atlantic Treaty Organization*) merupakan sebuah organisasi aliansi antar negara yang berfungsi sebagai pakta pertahanan kolektif (Duignan, 2000: 10; Sayle, 2019: 12). NATO memiliki dua tujuan utama, yaitu tujuan politik dan militer: (1) Pada aspek politik, NATO mencoba untuk mempromosikan nilai demokrasi dan kepercayaan antar pemerintahan yang diyakini dapat mencegah konflik di masa mendatang, (2) Sementara pada aspek militer, NATO berkomitmen untuk menggunakan kapabilitas militer sebagai fungsi manajemen krisis, jika upaya penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi telah gagal (Duignan, 2000: 11). Secara historis, NATO secara spesifik disusun untuk melindungi kedaulatan dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat (Sayle, 2019: 2). Hal ini tentunya berkaitan dengan konteks Perang Dingin, dunia melihat Uni Soviet yang mencoba untuk mengekspor komunisme kepada komunitas internasional, sebagai ancaman yang cukup serius (Duignan, 2000: 10). Dengan demikian, NATO dirancang sebagai garis pertahanan anggotanya dari segala prospek okupasi atau ‘pembebasan’ dari Uni Soviet.

Daya tarik dari NATO tertuang pada artikel ke-5 yang membunyikan mengenai pertahanan kolektif sebagai pilar utama organisasi (Duignan, 2000: 11). Artikel tersebut menyatakan bahwa NATO berkomitmen terhadap prinsip universal bahwa penyerangan terhadap salah satu dari anggota NATO, dapat diinterpretasikan menjadi penyerangan terhadap semua anggota (Sperling & Webber, 2009: 491; Sayle, 2019:2). Hal ini berarti bahwa jika salah satu anggota NATO dihadapkan oleh sebuah konflik atau agresi terbuka dari negara lain, maka anggota lain secara ketentuan memikul tanggung jawab untuk membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung guna menjaga keamanan dan kestabilan dari negara tersebut (Duignan, 2000: 9; Sperling & Webber, 2009: 491). Oleh karena itu, prinsip pertahanan kolektif yang digadang oleh NATO

tersebut merupakan motivasi utama dari negara-negara wilayah euro-atlantik, untuk mencari perlindungan dari adanya potensi ancaman kedaulatan eksternal, sekaligus ancaman bagi kepentingan Rusia.

Ancaman utama terhadap Rusia terletak pada ekspansi keanggotaan yang dilakukan oleh NATO menuju Timur. Tentunya hal tersebut berkaitan dengan bagaimana Rusia memandang aliansi tersebut secara menyeluruh. Sebagai sebuah kekuatan tradisional Eropa, tentunya Rusia memiliki pandangan negatif terhadap aliansi militer NATO dan doktrin ekspansinya. Bagi Rusia, NATO merupakan reliq masa lalu yang sudah seharusnya dirombak sejak berakhirnya Perang Dingin bersamaan dengan Pakta Warsawa (Sarotte, 2014: 91). Terlebih lagi, Rusia meyakini bahwa inkursi NATO menuju Eropa Timur, telah mengkhianati janji yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Amerika Serikat mengenai ekspansi keanggotaan NATO (Kramer, 2009: 39; Sarotte, 2014: 91). Pernyataan tersebut secara spesifik disebut oleh Presiden Putin (2021) pada konferensi tahunan Rusia pada tahun 2021, berkata "... mereka (NATO) berjanji untuk tidak bergerak menuju Timur, namun kenyataannya Rusia telah ditipu dan secara gamblang dikhianati". Janji yang dimaksud oleh Presiden Rusia tersebut, adalah janji pada tahun 1990 Amerika Serikat berjanji untuk tidak mengekspansikan keanggotaan NATO menuju Eropa Timur, sebagai ganti unifikasi Jerman Barat dan Timur serta masuknya negara tersebut kepada NATO,⁶ (Kramer, 2009: 39; Sarotte, 2014: 91). Dalam aspek geopolitik, Rusia melihat bahwa NATO pada kenyataannya hanyalah instrumen Amerika Serikat untuk memperluas kekuasaannya

⁶Pada faktanya, akademisi hubungan internasional seperti Sarotte (2014), Shifrinson (2016), Marten (2017) dan Mearsheimer (2019) meragukan keberadaan dari perjanjian tersebut. Didasari oleh penelitiannya, Sarotte (2014: 91) dan Marten (2017: 160) berkesimpulan bahwa tidak ada bukti yang konkrit mengenai perjanjian ekspansi NATO antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Sementara Shifrinson (2016: 40) dan Mearsheimer (2019: 11) berargumen bahwa perjanjian tersebut tidak ada secara eksplisit, namun tersirat dalam bentuk negosiasi mengenai unifikasi Jerman dan normalisasi hubungan diplomatis setelah antara kedua negara.

demokratik memperkuat posisinya sebagai hegemon dunia (Malek, 2009: 227). Ekspansi NATO menuju negara-negara *'the near abroad'* dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk menyabotase upaya Rusia dalam mempertahankan ruang lingkup yang menjadi bagian dari kekuasaannya (Malek, 2009: 227). Sarotte (2014: 91) berargumen bahwa pandangan tersebut menetapkan sebuah kondisi dimana Rusia tertinggal sebagai 'negara pinggiran' pada lanskap perpolitikan Eropa. Sehingga bagi Rusia, ekspansi keanggotaan NATO merupakan ancaman eksistensial terhadap keselamatannya posisi strukturalnya sebagai sebuah kekuatan regional.

Gelombang Ekspansi NATO Pasca Perang Dingin

Gelombang Ekspansi Timur	Tahun	Keanggotaan	Konsekuensi
Gelombang ke – 1	1999	Masuknya negara Polandia, Republik Ceko dan Hungaria, yang diundang secara resmi pada 1997 melalui pertemuan di Madrid (Marten, 2017: 135).	Kecaman keras dari Presiden Yeltsin untuk berhenti berekspansi menuju Timur (Marten, 2017: 156).
Gelombang ke – 2	2004	Ekspansi terbesar yang memasukkan negara Bulgaria, Romania, Slovakia, Lithuania, Latvia dan Estonia	Kecaman keras, terpuruknya relasi antara NATO dan Rusia, serta remiliterisasi angkatan perang Rusia secara masif

		(Kavadze & Kavadze, 2014: 22).	(Kavadze & Kavadze, 2014: 22).
Gelombang ke – 3	2008	Negosiasi yang memberikan Georgia serta Ukraina status sebagai <i>aspiring members</i> dari NATO (Kavadze & Kavadze, 2014: 22).	Protes keras dari Presiden Putin yang berujung pada invasi Rusia terhadap Georgia serta aneksasi Rusia terhadap wilayah Krimea pada tahun 2014 (Kavadze & Kavadze, 2014: 22).
Gelombang ke – 4	2009	Masuknya Albania dan Kroasia menjadi anggota resmi NATO.	Protes keras yang berakhir dengan Amerika Serikat menarik mundur program untuk menempatkan sistem misil di Polandia dan Republik Ceko.
Gelombang ke – 5	2017	Masuknya Montenegro menjadi anggota resmi NATO (Orlandic, 2016: 95).	Protes keras melalui manuver militer ZAPAD 2017 antara Rusia dan sekutunya,

			sebagai pelatihan penyergaman terhadap wilayah Eropa (Orlandic, 2016: 95).
--	--	--	--

Perambahan gelombang ekspansi NATO menuju Eropa Timur, tentunya bertabrakan dengan kepentingan Rusia untuk mempertahankan doktrin luar negerinya. Wilayah dan intensitas ekspansi yang semakin luas, mengundang reaksi yang memperbesar adanya potensi eskalasi konflik antara Rusia dan Amerika Serikat. Titik balik relasi antara kedua negara adidaya tersebut terlihat jelas, ketika melihat gelombang ekspansi ke-3 pada tahun 2008,⁷ yang menjanjikan keanggotaan NATO kepada Ukraina dan Georgia. Sebagai bagian dari doktrin *'the near abroad'*, masuknya Ukraina kepada aliansi militer tersebut berpotensi menciptakan krisis keamanan bagi Rusia. Intervensi bersifat politik dan ekonomi, baik secara langsung ataupun tidak, sangat krusial bagi Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di Ukraina. Intervensi tersebut juga menciptakan polarisasi tajam terhadap politik domestik Ukraina, seperti yang terlihat pada peristiwa *'Euromaidan'*,⁸ dan eksistensi separatisme di wilayah Donetsk dan Luhansk (Sperling & Webber, 2016: 34; Choonara, 2022; Megoran, 2022: 3). Kenyataan bahwa banyak dari masyarakat Ukraina menginginkan integrasi dengan NATO dan Uni Eropa, tidak

⁷Gelombang ekspansi ke-3 yang terjadi pada *Bucharest Summit* tahun 2008, merupakan katalis yang mendorong persetujuan geopolitik antara Rusia dan Amerika Serikat di Ukraina (Arbuthnot, 2008: 41; Kavadze & Kavadze, 2014: 23). Ekspansi tersebut merupakan awal dari rentetan konflik militer di Ukraina yang berujung pada topik dari penelitian ini.

⁸ Euromaidan merupakan gerakan demonstrasi terhadap Presiden Yanukovych yang terjadi di Ukraina pada tahun 2013 (Shveda & Park, 2015: 2). Gerakan tersebut muncul akibat keputusan Presiden Yanukovych untuk tidak menandatangani perjanjian antara Uni Eropa dan Ukraina, demi menjaga hubungan diplomatiknya dengan Rusia (Shveda & Park, 2015: 5).

menegasi kenyataan bahwa ekspansi NATO merupakan elemen utama dari invasi militer tersebut (Megoran, 2022: 3). Namun, Mearhseimer (2022) dan Megoran (2022) tetap menekankan bahwa isu terpenting adalah bagaimana Rusia mempresepsikan hal tersebut sebagai ancaman.

Sebagai bentuk jawaban dari tawaran keanggotaan NATO kepada Ukraina dan Georgia, Rusia memilih untuk menggunakan kapabilitas militernya dalam kapasitas preventif. Sesuai dengan argumentasi Sperling & Webber (2016: 34) dan Kavadze & Kavadze (2014: 23), kapabilitas militer tersebut terbukti pada keputusan Rusia untuk menyerang Georgia pada tahun 2008 sebagai bentuk penolakan terhadap ekspansi NATO. Invasi tersebut menciptakan kekacauan politik yang berujung pada lepasnya wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan menjadi negara merdeka yang diakui Rusia (Kavadze & Kavadze, 2014: 22). Hal serupa juga terjadi di Ukraina pada tahun 2013, Rusia secara unilateral menduduki wilayah Krimea dan menganeksasinya melalui referendum (Sperling & Webber, 2016: 35). Rusia juga memanfaatkan polarisasi politik yang tercipta dari aneksasi tersebut, dengan mempersenjatai dan mengakui kemerdekaan dari gerakan separatisme di wilayah Donetsk dan Luhansk (Sperling & Webber, 2016: 39). Kedua contoh relevan tersebut merupakan bentuk dari penolakan Rusia atas terjadinya ekspansi NATO menuju ruang lingkungannya. Sejalan dengan Mearsheimer (2022) dan Kempton (2022), hemat peneliti, aneksasi Krimea merupakan awal permusuhan terbuka diantara Rusia dan Ukraina.

Seperti yang sudah ditekankan sebelumnya, Ukraina memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung kelanjutan posisi Rusia sebagai hegemon Eropa Timur dan negara adidaya dalam struktur internasional. Kombinasi dari signifikansi sejarah dan strategis, menempatkan Ukraina menjadi salah satu aset dan prioritas utama Rusia untuk mempertahankan keberlangsungan dari doktrin *'the near abroad'*. Sejalan dengan pernyataan-pernyataan dari Hamianin

(Wawancara, 18 Oktober, 2022), Kempton, (2022) Mearsheimer (2022), Megoran, (2022), dan Sarotte (2022), Peneliti juga berpendapat bahwa ekspansi NATO merupakan elemen signifikan dari invasi militer yang sampai saat ini masih berlanjut. Prospek masuknya Ukraina dalam keanggotaan NATO, dapat menjadi ancaman langsung terhadap posisi struktural dan keselamatan Rusia, serta berpotensi merusak kestabilan Eropa Timur. Dalam perspektifnya, Russia tidak memiliki jalan lain selain ‘mengamankan’ Ukraina dari ekspansi NATO menggunakan segala cara, termasuk melalui jalur militer.

Komparasi Asumsi Awal Dengan Opini Komunitas Internasional

Sesuai dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya, peneliti menemukan bahwa terdapat dua faktor yang kemudian menjadi motivasi Rusia dalam melakukan invasi militer kedalam wilayah Ukraina. Faktor pertama adalah terkait dengan kebijakan luar negeri Rusia yang menetapkan adanya ruang lingkup kekuasaannya di Eropa Timur. Kebijakan tersebut di dorong oleh perjalanan historis Rusia yang memang dikenal sebagai kekuatan tradisional pada lanskap geopolitik Eropa. Bagi masyarakat dan birokrat Rusia, keruntuhan Uni Soviet merupakan katastrofe geopolitik yang mereduksi kekuatan serta prestis Rusia menjadi sebuah negara perifer. Oleh karena itu, adalah wajar jika Rusia memilih untuk mengadopsi sebuah kebijakan luar negeri, yang mencoba untuk membangkitkan kembali Rusia di kancah perpolitikan dunia. Perspektif Rusia terhadap Ukraina, didasari pada bagaimana Rusia melihat dirinya sendiri sebagai hegemon utama di Eropa Timur. Sehingga identitas Rusia sebagai negara adidaya dan penguasa Eropa Timur merupakan faktor pertama dari motivasi invasi militer terhadap Ukraina.

Faktor kedua adalah kekhawatiran dari Rusia terkait dengan adanya ekspansi NATO menuju negara-negara Eropa Timur yang tercakup dalam doktrin ‘*the near abroad*’. Bagi

Rusia, NATO merupakan sebuah instrumen internasional yang melayani kepentingan Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di dunia. Rusia menganggap bahwa ekspansi NATO merupakan upaya dunia Barat untuk mengisolir Rusia dan menjadikannya negara perifer dalam perpolitikan Eropa. Kenyataan tersebut diperparah dengan adanya upaya dari Ukraina untuk bergabung dengan NATO demi mencari perlindungan dari ancaman agresi Rusia. Masuknya Ukraina kepada NATO dapat diartikan sebagai gagalnya doktrin *'the near abroad'* serta ancaman eksistensial terhadap keselamatan posisi struktural Rusia sebagai sebuah negara adidaya. Oleh karena itu, peneliti berargumen bahwa ekspansi NATO terhadap Ukraina merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap terjadinya penyerangan tersebut.

Komunitas internasional dari berbagai dimensi, tentu memiliki tanggapan tersendiri mengenai motivasi dari penyerangan Rusia atas Ukraina. Peneliti berpendapat bahwa tanggapan tersebut dapat peneliti jadikan sumber data guna memvalidasi asumsi awal peneliti yang sudah dilampirkan di atas. Pada dimensi akademis, peneliti seperti Kempton (2022), Snyder (2022), Bakry (2022), Mearsheimer (2022) Sarotte (2022), dan Fukuyama (2022) mempunyai opini masing-masing terkait apa yang mereka asumsikan sebagai motif utama dari penyerangan tersebut. Di satu sisi, Kempton (2022), Snyder (2022), dan Fukuyama (2022), memiliki kesamaan pandangan bahwa invasi tersebut merupakan bukti empiris dari identitas Rusia, yang didasari oleh sejarahnya sebagai sebuah negara adidaya. Kempton (2022) dan Snyder (2022) melihat bahwa faktor utama dari invasi tersebut terletak pada ambisi imperialisme Rusia untuk mempertahankan ruang lingkup kebijakan *'the near abroad'* dan posisi strukturalnya. Sementara Fukuyama (2022) berfokus pada berkembangnya sistem demokrasi Ukraina, yang dapat meyebabkan kecemburuan sosial dan menjadi faktor destabilisasi bagi politik internal Rusia.

Opini yang bersebrangan terdapat pada argumentasi Bakry (2022), Mearsheimer (2022) dan Sarotte (2022), dimana mereka beranggapan bahwa penyerangan tersebut didorong oleh adanya ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh ekspansi NATO. Mearsheimer (2022) dan Sarotte (2022) melihat bahwa ekspansi NATO menuju Timur, mengalami tumpang tindih dengan kepentingan Rusia terkait ruang lingkungannya. Menurut Mearsheimer (2022) dan Sarotte (2022), penyerangan tersebut merupakan bentuk respon Rusia yang merasa terpojok oleh aliansi militer tersebut. Ancaman eksistensial tersebut semakin jelas ketika prospek masuknya Ukraina menjadi anggota resmi NATO, dapat diartikan sebagai penempatan kapabilitas militer NATO di pintu gerbang Rusia (Mearsheimer, 2022; Sarotte, 2022). Sehingga Rusia harus mengasersikan kekuataannya sebagai hegemon Eropa Timur, dan menahan ekspansi NATO dengan cara mendekatkan orbit Ukraina terhadap Rusia melalui sebuah invasi (Mearsheimer, 2022; Sarotte, 2022). Sedangkan Bakrie (2022) memilih untuk melihat bahwa invasi tersebut memiliki hubungan yang erat dengan upaya Rusia untuk merobohkan kondisi unipolaritas Amerika Serikat (Bakrie, 2022).

Sebagai bagian dari komunitas internasional, masyarakat umum juga memiliki pandangan tersendiri mengenai motivasi dari konflik ini. Dalam hal ini, Peneliti berhasil mengumpulkan informasi melalui komunikasi personal dengan argumentasi yang bermacam. Secara keseluruhan, ketujuh individu tersebut meyakini bahwa motif dari invasi tersebut tidak bisa dilihat dari satu perspektif saja. Mereka sependapat bahwa terdapat aspek geopolitik dan historis dibalik agresi Rusia. Menurut salah satu sumber yaitu M. Tereshkin (Wawancara, 09 Agustus 2022), aspek historis yang dimaksud adalah bagaimana “Rusia mencoba untuk kembali menjadi sebuah negara adidaya dengan cara-cara imperialistik”. Menurutnya, sejarah panjang Rusia sebagai kekuatan tradisional Eropa, telah mengkonstruksikan sebuah identitas bangsa Rusia yang “...terpredisposisi terhadap ekspansi dan imperialisme” (M. Tereshkin, Wawancara, 09

Agustus 2022). Argumentasi tersebut senada dengan beberapa subjek lain seperti P. Lisovyi (Wawancara, 07 Agustus 2022), S. Milish (Wawancara, 07 Agustus 2022), dan S. Prosser (Wawancara, 12 Agustus 2022), yang menurut mereka invasi tersebut merupakan ambisi Rusia yang dilatarbelakangi oleh sejarahnya sebagai kekuasaan terbesar di Eropa Timur. Terdapat juga subjek lain seperti O. Tan (Wawancara, 07 Agustus 2022) yang melihat bahwa aspek historis berkaitan dengan “...*revanchisme* Rusia dan rezim Presiden Putin”, setelah kekalahan dan kehancuran Uni Soviet pasca Perang Dingin. Jatuhnya Uni Soviet, secara tidak langsung berdampak pada prestise Rusia di mata komunitas internasional. Sehingga invasi tersebut merupakan “...upaya Rusia mengembalikan harga dirinya sebagai negara adidaya, yang dilatarbelakangi oleh sikap balas dendam” (O. Tan, Wawancara, 07 Agustus 2022). Beberapa subjek penelitian juga menyebutkan faktor ekspansi NATO yang memainkan peran penting pada topik penelitian. O. Tan (Wawancara, 07 Agustus 2022), P. Lisovyi (Wawancara, 07 Agustus 2022), S. Prosser (Wawancara, 12 Agustus 2022), P. Blanchet (Wawancara, 27 September 2022) dan N. Horgan (Wawancara, 27 September 2022) menyetujui bahwa aksi invasi militer Rusia, dapat ditranslasikan sebagai upaya Rusia untuk menahan ekspansi NATO yang merambat menuju wilayah kepentingannya. Secara spesifik, P. Blanchet (Wawancara, 27 September, 2022) dan N. Horgan (Wawancara, 27 September 2022) melihat bahwa masuknya Ukraina kepada NATO, dapat menjadi “...ancaman eksistensial yang melihat angkatan bersenjata NATO mengancam kedaulatan Rusia secara langsung”, dan dapat berakibat “...tunduknya Rusia terhadap segala tekanan diplomatik dan ekonomi yang dipaksakan oleh dunia Barat, khususnya Amerika Serikat”.

Pada dasarnya argumentasi yang dipresentasikan diatas memiliki pola yang cukup unik. Perbedaan yang dikatakan kontras tersebut dapat ditelusuri dari pandangan teoritis dari masing-masing subjek. Subjek penelitian yang melihat pada sisi historis dan ekspansionisme Rusia, cenderung memiliki

perspektif yang didasari oleh pandangan liberalisme. Perspektif liberalisme yang cukup idealistik, memandang bahwa aksi Rusia merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional, dan mengancam kedamaian dunia yang sudah berjalan sejak berakhirnya Perang Dingin. Hal ini tidak terlepas dari perspektif paradigma liberalisme yang memang menjunjung tinggi kooperasi ekonomi dan internasional yang berlandaskan hukum internasional. Sementara mayoritas dari argumentasi subjek penelitian, menyetujui bahwa isu mengenai ekspansi NATO merupakan alasan utama dari timbulnya konflik tersebut. Sejalan dengan pandangan peneliti, invasi ini merupakan konsekuensi dari ekspansi NATO menuju Eropa Timur, melihat peristiwa politik internasional melalui lensa perspektif realisme. Perspektif realisme memandang bahwa aksi tersebut didasari oleh Amerika Serikat yang mencoba menggunakan NATO sebagai alat ekspansi pengaruh, yang kemudian bertabrakan dengan kepentingan Rusia untuk mempertahankan ruang lingkungannya yang dimanifestasi dalam bentuk doktrin *'the near abroad'*. Tentunya pernyataan tersebut juga sejalan dengan teori realisme struktural yang menjadi teori utama dari penelitian. Dalam hal ini asumsi awal peneliti sejalan dengan aktor-aktor yang melihat invasi militer Rusia menggunakan lensa perspektif realisme, dan maka dari itu memiliki dasar teoritis yang sesuai dengan kajian teori penelitian ini

Kesimpulan

Menggunakan realisme struktural sebagai instrumen teoritis, peneliti berupaya menyorot perspektif Rusia terkait konflik dan peran mereka di dalam struktur internasional berbasis anarki. Pendekatan realisme struktural mencerminkan bagaimana Rusia mengubah perseteruan kekuasaan dan kepentingan strategisnya, menjadi sebuah perjuangan bertahan hidup di dalam struktur internasional. Hal tersebut kemudian menjadi acuan bagi Rusia untuk mengadopsi kebijakan luar negeri yang sejalan dengan pola pikir tersebut. Motif dari invasi

militer tersebut semakin terlihat jelas ketika menyangdingkan kepentingan nasional Rusia dengan eksistensi NATO dan doktrin ekspansinya. NATO yang secara perlahan bergerak menuju wilayah Eropa Timur, memberikan ancaman yang cukup serius terhadap negara-negara *'the near abroad'* yang dianggap vital terhadap kepentingan Rusia. Sejak referendum ilegal yang menganeksasi semenanjung Krimea, Ukraina secara tegas mulai memperlihatkan retorika untuk mencari perlindungan kolektif dengan NATO.

Daftar Rujukan

- Abushov, K. (2009). Policing the near abroad: Russian foreign policy in the South Caucasus. *Australian Journal of International Affairs*, 63(2), 187-212.
- Amao, O. B. (2019). The foreign policy and intervention behaviour of Nigeria and South Africa in Africa: A Structural Realist Analysis. *South African Journal of International Affairs*, 26(1), 93-112.
- Arbuthnot, J. (2008). The Bucharest Summit and the Future of NATO. *The RUSI Journal*, 153(3), 40-44.
- Bushkovitch, P. (2012). *A Concise History of Russia*. New York: Cambridge University Press.
- Cameron, D. R., & Orenstein, M. A. (2012). Post-Soviet Authoritarianism: The Influence of Russia in Its "Near Abroad". *Post-Soviet Affairs*, 28(1), 1-44.
- Charap, S., & Darden, K. (2014). Russia and Ukraine. *Survival*, 56(2), 7-14.
- Chauhan, T. (2020). Why Are Warm-Water Ports Important to Russian Security: The Case of Sevastopol and Tartus Compared. *European, Middle Eastern, & African Affairs*, 57-76.
- Chebankova, E. (2014). Contemporary Russian liberalism. *Post-Soviet Affairs*, 30(5), 341-369.
- Cockburn, A. (2022, March 1). Journalist Andrew Cockburn & Historian Timothy Snyder on Ukraine, Russia, NATO Expansion & Sanctions. (A. Goodman, Interviewer) *Democracy Now!* Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=-Y8ny69uU3g>

- Cottrell, R. (1996). Russia's parliamentary and presidential elections. *Government and Opposition*, 31(2), 160-174.
- Dugin, A. (2014). *Eurasian Mission: An Introduction to Neo-Eurasianism*. 2014: Arktos Media Ltd.
- Duignan, P. (2000). *NATO: Its Past, Present, Future*. Hoover Institute.
- Duncan, P. J. (2005). CONTEMPORARY RUSSIAN IDENTITY BETWEEN EAST AND WEST. *The Historical Journal*, 48(1), 277-294
- Eichler, J. (2021). *Nato's Expansion After the Cold War*. Cham: Springer.
- Elman, C. (2007). Realism. In M. Griffiths, *International Relations Theory for the Twenty-First Century: An Introduction* (pp. 11-20). New York: Routledge.
- Fukuyama, F. (2022, May 27). CDE Conversations | Prof Francis Fukuyama on War in Europe and its Implications. (A. Bernstein, Interviewer) Centre for Development and Enterprise. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=BdBQuoSHng8>
- Giella, L. (2021, June 22). Vladimir Putin Blasts NATO Expansion as 'Relic of the Cold War' in Op-Ed . Retrieved from Newsweek: <https://www.newsweek.com/vladimir-putin-blasts-nato-expansion-relic-cold-war-op-ed-1602956>
- Gilderhus, M. T. (2006). The Monroe Doctrine: Meanings and Implication. *Presidential Studies Quarterly*, 36(1), 5-16.
- Glaser, C. L. (2003). Structural Realism in a more complex world. *Review of International Studies*, 29, 403-414.
- Grossman, M. (2005). Role Theory and Foreign Policy Change: The Transformation of Russia Foreign Policy in the 1990s. *International Politics*, 42, 334-351.
- Hagen, M. V. (1995). Does Ukraine Have a History? *Slavic Review*, 54(3), 658-673.
- James, P. (1995). Structural Realism and the Causes of War. *Mershon International Studies Review*, 39(2), 181-208.

- Jones, E. (2009). Look for the Blind Spot where Structural Realism Meets Pluralistic Stagnation. *The British Journal of Politics and International Relations*, 11, 225-237.
- Kappeler, A. (2014). Ukraine and Russia: Legacies of the imperial past and competing memories. *Journal of Eurasian Studies*, 5(2), 107-115.
- Karagiannis, E. (2013). The 2008 Russian–Georgian war via the lens of Offensive Realism. *European Security*, 22(1), 74-93.
- Karyakin, V. (2015). CIVIL WAR IN SOUTH-EAST OF UKRAINE: A SCENARIO ANALYSIS AND PREDICTION OF POLITICO-MILITARY BACKGROUND. *Conflict Studies*, 1, 31-44
- Kavadze, A., & Kavadze, T. (2014). NATO Expansion to the East: Georgia's Way to NATO Membership, Perspectives and Challenges. *Journal of Social Sciences*, 3(2), 21-27.
- Kempton, D. (2022). The Russian Invasion of Ukraine: Motives and Response | Dr. Daniel Kempton [Speech recording]. Franciscan University of Steubenville. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=t3GO6Xvmh8k>
- Kramer, M. (2009). The Myth of a No-NATO-Enlargement Pledge to Russia. *THE WASHINGTON QUARTERLY*, 32(2), 39-61.
- Kolesnikov, S. (1996). The dilemma of “Our Home Is Russia”: A view from the inside. *Demokratizasiya*, 4(3), 358-370.
- Kuzio, T. (2016). Ukraine between a Constrained EU and Assertive Russia. *JCMS*, 1-18
- Laitin, D. D. (2000). POST-SOVIET POLITICS. *Annu. Rev. Polit. Sci.*, 3, 117-148.
- Laurelle, M. (2008). *Russian Eurasianism: an Ideology of Empire*. Washington D.C: The John Hopkins University Press.
- Ledonne, J. P. (2004). *The Grand Strategy of the Russian Empire 1650-1831*. New York: Oxford University Press.
- Lepingwell, J. W. (1994). The Russian Military and Security Policy in the 'Near Abroad'. *Survival*, 36(3), 70-92
- Litera, B. (1994). The Kozyrev Doctrine - a Russian Variation on the Monroe Doctrine. *Perspectives*(4), 45-52.

- Lynch, A. C. (2015). The influence of regime type on Russian foreign policy toward "the West", 1992-2015. *Communist and Post-Communist Studies*, 1-11.
- Malek, M. (2009). GEORGIA & RUSSIA: THE "UNKNOWN" PRELUDE TO THE "FIVE DAYS WAR". *CAUCASIAN REVIEW OF INTERNATIONAL AFFAIRS*, 3(2), 227-232.
- Mankoff, J. (2014). Russia's Latest Land Grab: How Putin Won Crimea and Lost Ukraine. *Foreign Affairs*, 61-68.
- Marten, K. (2017). Reconsidering NATO expansion: a counterfactual analysis of Russia and the West in the 1990s. *European Journal of International Security*, 3(2), 135-161.
- Mearsheimer, J. J. (2007). Structural Realism: International Relations Theory. *Discipline and Diversity*, 83, 77-94.
- Mearsheimer, J. J. (2009). Reckless State and Realism. *International Relations*, 23, 241-255.
- Mearsheimer, J. J. (2019). Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. *International Security*, 43(4), 7-50.
- Mearsheimer, J. J. (2022, April 14). John Mearsheimer On Who Gains The Most From The Ukraine-Russia War & What Could End Putin's Assault. (Z. Jacob, Interviewer) CRUX. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=XgiZXgYzI84>
- Morgenthau, H. J. (1947). *Scientific Man vs Power Politics*. London: Latimer House Limited.
- Neumann, I. B. (2008). Russia as a great power, 1815–2007. *Journal of International Relations and Development*, 11, 128-151.
- Neumann, I. B. (2015). I Remember When Russia Was a Great Power. *Journal of Regional Security*, 10(1), 5-16.
- Orlandic, S. (2016). The Euro-Atlantic integration in the whirlpool of geopolitics: the Case of Montenegro. *European Perspectives – Journal on European perspectives of the Western Balkans*, 1(14), 89-113.
- Plokhy, S. (2006). *The Origins of Slavic Nation: Premodern Identities in Russia, Ukraine and Belarus*. Cambridge University Press

- Plokhly, S. (2008). *Ukraine and Russia: Representation of the Past*. London: University of Toronto Press.
- Putin, V. (2015, June 20). Putin: 'Ukrainians and Russians Are One People' (June 19, 2015) | Charlie Rose. (C. Rose, Interviewer) Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=6F7DxpgHgdQ>
- Rezvani, B. (2020). Russian foreign policy and geopolitics in the Post-Soviet space and the Middle East: Tajikistan, Georgia, Ukraine and Syria. *Middle Eastern Studies*, 56(6), 878-899.
- Rotaru, V. (2017). Forced Attraction?: How Russia is Instrumentalizing Its Soft Power Sources in the "Near Abroad". *Problems of Post-Communism*, 1-12.
- Sarotte, M. E. (2014). A Broken Promise? - What the West Really Told Moscow About NATO Expansion. *Foreign Affairs*, 93(5), 90-97.
- Sarotte, M. E. (2022). Lecture of Mary Sarotte «Not One Inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate» [Speech recording]. Kyiv School of Economics. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=aHj0K9PofCw>
- Sayle, T. A. (2019). *Enduring Alliance: A History of NATO and the Postwar Global Order*. New York: Cornell University Press.
- Schmidt, M. (2005). Is Putin Pursuing a Policy of Eurasianism? *Demokratizatsiya*, 13(1), 87-99.
- Shiffrinson, J. R. (2016). Deal or No Deal? The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit NATO Expansion. *International Security*, 40(4), 7-44.
- Shlapentokh, D. V. (1997). Eurasianism: Past and Present. *Communist and Post Communist Studies.*, 30(2), 129-151.
- Shveda, Y., & Park, J. H. (2015). Ukraine's revolution of dignity: The dynamics of Euromaidan. *Journal of Eurasian Studies*, 1-7.
- Snyder, T. (2022, May 5). Historian Timothy Snyder: Russia's Invasion of Ukraine Is a Colonial War. (A. Goodman, Interviewer) Democracy Now! Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=7d21K_csDds

- Sperling, J., & Webber, M. (2009). NATO: from Kosovo to Kabul. *International Affairs*, 85(3), 491-511.
- Sperling, J., & Webber, M. (2016). NATO and the Ukraine crisis: Collective securitisation. *European Journal of International Security*, 2(1), 19-46.
- Sprozluk, R. (2009). The Western Dimension of the Making of Modern Ukraine. In L. M. Onyshevych, & M. G. Rewakowicz, *Contemporary Ukraine on the cultural map of Europe* (pp. 3-17). New York: Shevchenko Scientific History.
- Toal, G. (2017). *Near Abroad: Putin, The West and the Contest Over Ukraine and the Caucasus*. New York: Oxford University Press.
- Tolstrup, J. (2009). Studying a negative external actor: Russia's management of stability and instability in the 'Near Abroad'. *Democratization*, 16(5), 922-944.
- Tolz, V. (2002). Rethinking Russian-Ukrainian relations: a new trend in nation-building in post-communist Russia. *Nations and Nationalism*, 8(2), 235-253.
- Tyulenev, S. (2009). THE ROLE OF TRANSLATION IN THE WESTERNIZATION OF RUSSIA IN THE EIGHTEENTH CENTURY. 1-317.
- Weeks, T. R. (2006). Managing empire: tsarist nationalities policy. In D. Lieven, *The Cambridge History of Russia: Volume II Imperial Russia, 1689-1917* (pp. 27-44). New York: Cambridge University Press.
- Way, L. A. (2015). The limits of autocracy promotion: The case of Russia in the 'near abroad'. *Political Research*, 54(4), 691-706.
- Yakobson, S. (1949). The Soviet Concept of Satellite States. *The Review of Politics*, 11(2), 184-196.